

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Mahrus. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus. 2013. Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi. Jakarta: Rajawali Press.
- Arief, Barda Nawawi. 2003. kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. 2008. Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fauzan, M. 2015. Peranan PERMA dan SEMA sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung, Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. 2015. Pemberasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: RT RajaGrafindo Persada.
- Hatrik, Hamzah. 1996. Azas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, Chairul. 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana.
- IGM Nurdjana. 2009. Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi. Yogyakarta: Total Media.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. Memahami Untuk Membasmi, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marlina. 2011. Hukum panitensier, Bandung : Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Surabaya: Kencana Prenada Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Liberty.

- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2011. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nawawi Arief, Barda. 2002. Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- O.S. Hiariej, Eddy. 2014. Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.
- Setiyono, H. 2002. Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. Malang: Averroes Press.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2017. Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya Edisi kedua. Jakarta: Kencana Predanamedia Group.
- Soekanto, Soeryono. 2002. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja.Grafindo Persada
- Suartha, I Dewa Made. 2015. Hukum Pidana Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia. Malang: Setara Press.
- Sudarto. 1983. Hukum dan Perkembangan Masyarakat. Bandung: Sinar Baru.
- Suteki dan galang Taufani. 2018. Metodologi Penelitian Hukum (Fiksafat, Teori dan Praktik), Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Susanto, I. S. Kejahatan Korporasi. 1997. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tongat. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif pembaharuan. Malang: Penerbit UMM Press.
- Utrecht. E. 1965. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Yunara, Edi. 2005. Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Jurnal:

- Kristina, Michelle. 2018. Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dengan Adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan, Vol. 21 No. 2.
- Mezak, Meray Hendrik. 2006. Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. Jurnal Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3.
- Suhariyanto, Budi. 2018. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi. Jurnal Negara Hukum, Volume 9, Nomor 1,

Peraturan Perundang Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi.
- Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman.

Sumber lainnya:

Mugopal, Undang. 2016. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Persoalan dalam Praktik). Makalah seminar tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Badiklat Hukum dan Peradilan, Selasa tanggal 15 Nopember 2016, di Hotel Grand Mercure Jakarta Pusat.

Reksodiputro, Mardjono. 1989. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi, makalah FH-UNDIP.

Muladi. 1989. Fungsionalisasi hukum pidana dalam kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, (Semarang: Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst.